



# Pengaruh Revolusi Iran Terhadap Kondisi Hubungan Luar Negeri Iran Pada Tahun 1978-1980

Ahmad Meiza Zein<sup>1\*</sup>, Hasbi Alhadi<sup>2</sup>, M. Erza Rafi Kurnia<sup>3</sup>, Muhammad Tristan Shah Jahan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>1\*</sup>ahmadmeiza456@gmail.com, <sup>2</sup>alhadihasbi@gmail.com, <sup>3</sup>erjara90@gmail.com, <sup>4</sup>andititan93@gmail.com

## Abstrak

Revolusi Iran merupakan salah satu fenomena politik modern yang memberikan dampak besar terhadap aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat Iran. Revolusi ini adalah reaksi perlawanan terhadap kekuasaan Shah Reza Pahlevi yang bertindak secara sewenang-wenang. Hasil dari revolusi ini ialah memberikan perubahan terhadap tatanan ekonomi hingga tatanan hubungan luar negeri yang dibina oleh negara Iran. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yang ditimbulkan dari Revolusi Iran terhadap kondisi hubungan luar negeri Iran. Melalui hasil pengkajian menggunakan metode historis, dapat disimpulkan bahwa Revolusi Iran merubah hubungan diplomatik Iran dengan negara-negara yang membantu ekonominya, serta Revolusi Iran mempengaruhi semangat masyarakat di beberapa negara Timur Tengah untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman kekuasaan otoritarianisme.

**Kata Kunci :** Revolusi, Luar Negeri, Hubungan

## PENDAHULUAN

Revolusi menjadi salah satu alternatif dalam melakukan suatu perubahan. Dalam lintasan sejarah, revolusi banyak mempengaruhi stabilitas ruang dan waktu yang tak dapat terpisahkan. Terkadang revolusi membawa perubahan secara konstruktif terhadap tatanan suatu bangsa, akan tetapi revolusi juga dapat membawa perubahan masyarakat secara destruktif yang memungkinkan tatanan suatu bangsa berada dalam titik ketidakstabilan seperti halnya yang dialami oleh Republik Islam Iran pasca-revolusi tahun 1978-1979.

Meletusnya Revolusi Iran diakibatkan oleh adanya kesenjangan antara masyarakat kelas atas yang dipengaruhi pengaruh westernisasi dengan kelompok masyarakat konservatif dalam konteks meraih keuntungan dari kemajuan ekonomi Iran pada masa kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlevi (1941-1979) yang terlalu berorientasi pada pembangunan sektor industri kapitalisme. Hal lain yang menyebabkan revolusi meletus ialah ketika Pemerintahan Shah Reza Pahlevi melahirkan eksese kekuasaan yang korup, oligarki dan terpatron. Pemerintahannya pun menunjukkan sisi sekulerisme ketika Shah berusaha menyingkirkan peranan kaum agama secara represif dari kancah perpolitikan (Sumarno, 2020; Sihbudi, 1989).

Revolusi Iran yang terjadi dalam kurun waktu 1978 hingga 1979 memberikan implikasi besar terhadap aspek-aspek masyarakat dan pemerintahan Iran, salah satunya dalam aspek politik luar negeri. Semula, politik luar negeri Iran begitu bergantung pada Amerika Serikat dan memelihara hubungan diplomatik secara baik dengan Israel. Namun pasca-revolusi, Iran memusuhi Amerika Serikat dan Israel serta memberangus pengaruh politik Barat yang sebelumnya terlalu mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara (Sihbudi 1989).

Maka daripada itu, akan dipaparkan lebih lanjut melalui artikel jurnal mengenai dampak Revolusi Iran terhadap kondisi politik luar negeri Iran pada kurun waktu 1978-1979 dan mengulas hubungan diplomasi Iran dengan negara-negara di Timur Tengah serta negara adidaya kala itu seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet secara analitis dan komprehensif.

## METODE

Metode historis digunakan dalam penyusunan artikel jurnal ini. Metode historis terdiri atas rangkaian prinsip dan aturan sistematis yang dirancang untuk membantu secara efektif dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, melakukan penilaian kritis terhadapnya dan menyajikan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai, umumnya disusun dalam bentuk tulisan (Garraghan, 1957).

Langkah-langkah yang digunakan dalam metode historis meliputi beberapa tahapan, yakni tahap heuristik atau pengumpulan sumber-sumber sejarah baik dari buku maupun artikel jurnal yang berbentuk fisik maupun elektronik. Selanjutnya ialah melakukan kritik terhadap sumber yang sudah dikumpulkan melalui kritik internal dan eksternal, lalu menyeleksi data yang paling valid untuk dijadikan sumber rujukan. Kemudian tahap menginterpretasikan sumber-sumber yang telah diseleksi dengan cara menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber. Tahap akhir yakni

historiografi yang merupakan rangkaian penulisan sejarah yang didasarkan atas penelitian dan disampaikan melalui perspektif penulis melalui interpretasi berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh (Sayuti, 1997; Winarti dkk, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Kondisi Iran Sebelum Meletusnya Revolusi

Sebelum revolusi meletus pada tahun 1978, Iran sesungguhnya merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang maju dan berkembang. Selama kurang lebih 38 tahun Iran dipimpin oleh seorang Shah (Raja) bernama Mohammad Reza Pahlevi, Iran mengalami kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai sektor pembangunan termasuk dalam aspek pembangunan ekonomi industri. Meskipun pembangunan ekonomi dapat berdampak baik terhadap kemajuan-kemajuan aspek pembangunan lainnya, namun tidak untuk aspek pembangunan politik. Kemajuan ekonomi Iran yang begitu melesat menjadi anomali bagi perkembangan politik dan sosial-budaya Iran yang lambat laun semakin mundur akibat eksistensi pemerintahan Shah Reza Pahlevi yang otoriter dan korup.

Dalam mengembangkan pembangunan ekonomi industrinya, Iran lebih menitik-beratkan pengembangan industri otomotif serta elektronik. Pengembangan sektor-sektor industri tersebut ditopang oleh hasil keuntungan produksi minyak bumi yang diproduksi dari beberapa kilang minyak seperti di Teheran, Abadan dan Isfahan. Namun dengan mengandalkan keuntungan dari produksi minyak saja tidaklah cukup untuk membiayai pembangunan industri demi menggenjot kenaikan produktivitas. Maka daripada itu, pemerintahan Iran dibawah kekuasaan Shah Reza Pahlevi membuka kesempatan modal-modal asing untuk berinvestasi dan menanamkan modal, serta para pemodal asing tersebut diberikan fasilitas-fasilitas yang memadai demi menarik para pemodal lainnya untuk menanamkan modal di Iran (Sihbudi, 1989).

Di tengah hiruk-pikuk Perang Dingin, Iran memanfaatkan eksistensi Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk bekerja sama dengan Iran dalam pembangunan sektor ekonomi industri. Uni Soviet membantu Iran dalam mengembangkan industri baja di Isfahan, sedangkan Amerika Serikat membantu Iran dalam mengembangkan industri karet, obat-obatan, petrokimia dan konstruksi. Dapat dikatakan, Iran begitu bergantung akan eksistensi negara adidaya yang sedang berkonflik dalam mengembangkan perekonomiannya (Graham, 1979).

Kemajuan ekonomi yang pesat berhasil meningkatkan *GNP* per kapita Iran pada kala itu secara revolutif, dari yang sebesar 450 dollar AS di tahun 1971 menjadi \$ 2.400 dollar AS di tahun 1978. Kemajuan pesat ekonomi yang diterima oleh Pemerintah Iran tidak semata-mata memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat luas. Industri-industri yang dibangun tak dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya karena industri padat modal lebih diutamakan sedangkan industri padat karya jumlahnya semakin menurun. Maka daripada itu, jumlah pengangguran di beberapa kota semakin meningkat drastis dan karena pengembangan sektor-sektor industri di Iran pada kala itu terdapat campur tangan dari pihak asing maka Iran semakin bergantung pada negara luar dan tidak dapat menunjukkan kemandirian ekonominya (Sihbudi, 1989).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Shah Reza Pahlevi tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1950an dan menjadi sebuah pertentangan di kancah perpolitikan serta menimbulkan gejolak ketidakpuasan masyarakat. Untuk mempertahankan eksistensi kekuasaannya, Shah Reza Pahlevi meligitimasi pemerintahannya dengan program 'Revolusi Putih' yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sumber daya manusia masyarakat Iran. Meski demikian, program tersebut ialah cara politis meredam kekuatan oposisi yang menggoyangkan Rezim Pahlevi serta secara *status quo* mengisyaratkan bahwa Revolusi Putih yang dicanangkan ialah ujung tombak dalam merekonstruksi keadaan ekonomi, sosial dan budaya dengan basis konsep modernisasi di segala aspek masyarakat (Ansari, 2010).

Program tersebut digarap pada Januari 1963 dengan meliputi enam aspek yang difokuskan, yakni land reform, nasionalisasi hutan dan padang rumput (*pastures*), penjualan pabrik-pabrik sebagai bentuk pembiayaan land reform, pembagian laba antara pemillik dan pekerja pabrik, reformasi hak pilih perempuan dan terakhir yakni pembentukan korps pemberantasan buta huruf. Shah merencanakan serangkaian perubahan yang luas yang ia sebut sebagai politik, sosial, integritas sosial barat, demokrasi ekonomi, dan otonomi. Dia menginginkan pembatasan kebebasan pergerakan massa dan merubah corak masyarakat yang tradisional menjadi modern. Shah melanjutkan transformasi ini untuk mencapai visinya sendiri tentang pembangunan sosial dan ekonomi tanpa menghasut perubahan politik yang penting untuk melemahkan posisinya (Muzaffar dkk, 2018; Sihbudi, 1989).

Pengimplementasian Revolusi Putih memang baik dalam pengembangan program sosial, pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, program Revolusi Putih merupakan bentuk perpanjangan-tangan Pemerintah Amerika Serikat dalam mengintervensi ekonomi dan sosial-politik Iran. Program ini pula menjadi alat legitimasi Shah Reza Pahlevi untuk mempertahankan eksekutif kekuasaannya di kalangan petani, pemilik tanah dan masyarakat kelas menengah ke bawah di perkotaan, juga untuk mempertahankan citra dan meredam stigma buruk dari kekuasaannya (Muzaffar dkk, 2018).

Untuk menjaga marwah kekuasaannya, Shah Reza Pahlevi mengonsolidasi kekuatan aparat pertahanan dan keamanan, pasukan khusus pengawal kerajaan, serta membentuk dinas intelijen atau polisi rahasia yang diberi nama "SAVAK" (*Sazman e Etelaat Va Am niyat Keshvar*) untuk menindak para oposisi-oposisi Rezim Pahlevi secara represif dan tidak manusiawi. SAVAK menjadi teror dan ancaman kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi masyarakat Iran.

Mulanya, SAVAK didirikan untuk membendung pengaruh-pengaruh komunisme, seperti aktivitas politik berhaluan komunis yang dilakukan oleh Partai Tudeh. Namun seiring berjalannya waktu, SAVAK tidak hanya memfokuskan diri untuk membendung paham komunis, tetapi juga kepada seluruh warga Iran yang tidak sejalan dengan Rezim Pahlevi. SAVAK menimbulkan paranoia di kalangan masyarakat Iran karena metode operasinya yang rahasia dan acap kali melakukan penculikan serta penyiksaan hingga menyebabkan kematian terhadap individu yang menentang Rezim Pahlevi. Selain itu, SAVAK juga melakukan sensor media secara masif untuk menekan pemberitaan yang buruk terkait pemerintahan (Fauziyah, 2016).

Rezim Pahlevi juga membatasi kaum mullah (ulama) bermazhab Syiah yang memiliki prinsip bahwa agama dengan politik tak bisa dipisahkan, prinsip tersebut dimanifestasikan dalam keterlibatan kaum mullah di kancah perpolitikan nasional. Akan tetapi, peranan kaum mullah dikebiri oleh Rezim Pahlevi secara penuh dengan cara pelemahan kaum mullah di parlemen dan mencabut hak kaum *mullah* dalam memeriksa dan membatalkan undang-undang yang dihasilkan parlemen (Sihbudi, 1989).

Perpolitikan Iran di bawah Shah Reza Pahlevi berada dalam titik terendah dari esensi demokratis dan sesuai dengan konstitusi Iran. Rezim Pahlevi memberlakukan sistem dua partai sejak tahun 1953, terdiri dari Partai *Melliyan* atau *Novin* yang diproyeksikan mendukung kekuasaan Rezim Pahlevi dan ada Partai *Mardom* yang berperan menjadi oposisi pemerintahan. Kedua partai tersebut dibentuk dan didesain untuk mengkamufilase terlaksananya proses demokrasi di Iran. Tahun 1975, Shah Reza Pahlevi merubah sistem dwi-partai menjadi sistem partai tunggal dengan membentuk Partai *Rastakhiz* atau Partai Kebangkitan Nasional. Partai tersebut menjadi penyokong kekuasaan Shah Reza Pahlevi serta mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan (Sihbudi, 1989).

Dalam pemerintahannya, Rezim Pahlevi telah menunjukkan pola kekuasaan yang sekuler, absolut dan inkonstitusional. Bagaimana peranan agama dan mullah atau ulama dalam pemerintahan dikerdilkan dari posisinya serta proses demokrasi di Iran ditelanjangi begitu saja oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Disamping itu, kekuasaan telah diintervensi oleh kekuatan asing dari negara Amerika Serikat yang secara penuh mengutak-atik kebijakan ekonomi dan politik Iran serta memainkan strategi politik internasional dalam aspek hubungan diplomatik dan kemiliteran.

Dalam aspek sosial-budaya, Shah berupaya mensekulerisasikan negaranya dengan upaya modernisasi dan mengurangi pengaruh dari agama dan kaum *mullah* yang tentunya sangat tidak disukai oleh kebanyakan masyarakat Iran yang religius. Dalam upaya sekulerisasinya, Shah mengubah sistem penanggalan yang awalnya menggunakan penanggalan Hijriyah menjadi penanggalan Masehi. Kemudian Shah pun memberikan keleluasaan dalam masuknya pengaruh budaya Barat kedalam masyarakat Iran. Selain kedua hal tersebut, Shah pun lebih memberikan penghormatan dan perhatian kepada Cyrus yang agung dibandingkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Penghormatan pada leluhur bangsa Iran yaitu Cyrus direalisasikan oleh Shah dengan memperingati 2500 tahun berdirinya kerajaan Iran. Sebuah acara yang telah dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh dari berbagai negara (Sihbudi, 1989).

## II. Meletusnya Revolusi Sebagai Reaksi Masyarakat Iran Melawan Pemerintahan Shah Reza Pahlevi

Sebuah pernyataan resmi terkait penanggalan kapan resminya revolusi ini dimulai cukup sulit diidentifikasi. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa pergolakan-pergolakan panjang masyarakat Iran yang untuk meruntuhkan kekuasaan Shah Reza Pahlevi meletus pertama kali di Kota Qom pada 9 Januari 1978. Penyebab utama demonstrasi tersebut ialah akibat dari pernyataan Menteri Penerangan Iran, Darius Hamayan yang dinilai telah menghina Ayatollah Khomeini, sosok ulama yang begitu dihormati dan dicintai rakyat Iran (Sihbudi, 1989).

Pertama kalinya nama Ayatollah Khomeini terdengar di seluruh penjuru Iran. Ia menetap di pengasingan selama 14 tahun. Namun perlu dicatat, perlawanan terhadap Shah sebetulnya telah terjadi sebelum peristiwa ini. Ketika Jimmy Carter dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, ia mengkritik negara-negara yang telah melanggar hak asasi manusia, termasuk Iran. Kritik dari Presiden Carter ini disambut hangat oleh kaum intelektual Iran. Sungguh petaka bagi Iran, sekutunya yang paling penting telah berani mengkritik kebijakannya. Kritik dari Carter tersebut telah menjadi stimulus dari keberanian para kaum intelektual untuk mengkritik Rezim Shah Pahlevi. Pada musim semi tahun 1977, pamflet-pamflet anti-Shah disebar di berbagai universitas dan pada bulan Juni 1977 sejumlah 92 penyair dan seniman mengirim sebuah surat terbuka permintaan kepada shah meminta kebebasan untuk menulis, berpikir dan berbicara (Tamara, N, 1980).

Pada bulan Juni 1977, ketiga tokoh dari Front Nasional Iran yaitu Karim Sanjabi, Darius Furuhar dan Shapur Baktiar mengirimkan nota untuk Shah Reza Pahlevi yang memuat kritikan atas Rezim Shah yang gagal dalam menjalankan fungsinya dalam menyejahterakan rakyat serta telah menyebabkan harga pokok melambung tinggi, kelaparan massal, kegagalan dalam produksi pertanian dan peternakan, defisit neraca perdagangan, krisis tajam di bidang industri nasional, pelanggaran hak asasi manusia dan konstitusi dan aksi represif aparat negara. Anggota-anggota dari Front Nasional yang telah terbungkam selama 25 tahun ini meminta agar pemerintahan kediktatoran dihapuskan, kebijakan partai tunggal dicabut, kemerdekaan pers dikembalikan serta tahanan-tahanan politik dibebaskan. Seruan tersebut telah mendapatkan perhatian dari seluruh rakyat Iran dan menggema di sepanjang penjuru negeri (Tamara, 1980).

Masih di bulan yang sama, sekitar 140 pengacara meminta agar seluruh pengadilan militer dibubarkan dan tahanan politik dibebaskan. Sementara itu di bulan Oktober, persatuan penulis dan seniman Iran mengadakan sebuah acara kebudayaan dan pembacaan puisi di *Goethe Institut*, Teheran. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan orang dan berlangsung selama 10 hari, 10 malam dengan mengangkat tema kebebasan di berbagai aspek masyarakat. Akibat dari

gerakan tersebut, Shah semakin keras dalam menekan dan mengintimidasi para kaum intelektual dan pengacara (Tamara, 1980; Mundzir, 2020).

Amarah masyarakat Iran membunyah ketika Presiden AS, Jimmy Carter melakukan kunjungan kerja ke Iran. Kedatangannya pada akhir bulan Desember 1977 hingga awal Januari 1978 tersebut semakin memperhangat pembicaraan terkait hak asasi manusia di Iran. Akan tetapi, rakyat Iran mengalami kekecewaan akibat Carter memuji Shah sebagai pahlawan kemanusiaan. Kendati demikian, setelah Carter meninggalkan Iran, terdapat demonstrasi besar-besaran di kota Tabriz yang mengakibatkan 100 orang tewas dan 650 orang ditangkap dan disiksa oleh aparat keamanan. Di bulan Oktober 1977, di kota Najaf, putra Ayatollah Khomeini yaitu Mustafa ditemukan wafat di tempat tidurnya. Pemerintah melarang otopsi terhadap jenazahnya sehingga kasus kematian tersebut dipenuhi dengan selubung misteri. Namun, terdapat beberapa bukti yang menyatakan bahwa aparat SAVAK yang menjadi pelaku pembunuhan dari Mustafa. Insiden ini memicu aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kurang lebih 4000 mahasiswa di kota Qom pada bulan Januari 1978. Kepolisian merespon aksi tersebut dengan tindakan represif, menyerang demonstran dengan senjata dan menelan korban jiwa sejumlah tujuh puluh massa demonstrasi (Tamara, 1980; Mundzir, 2020).

Perlawanan untuk menentang kekuasaan Shah Reza Pahlevi semakin tak terbendung. Di Kota Tabriz, seruan "mati kau Shah!" pertama kali terdengar. Sejak saat itu, peran intelektual dan partai politik telah digantikan oleh para kaum *mullah* yang mampu menggerakkan rakyat. Aksi semakin menjadi-jadi pada bulan Maret dan April 1978, pemerintah meresponnya masih dengan tindakan intimidatif dan represif. Aksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat Iran tersebut memiliki suatu landasan yang terletak pada kemajuan kekuatan-kekuatan produktif dan perubahan yang telah terjadi di Iran akibat dari kapitalisme selama periode sebelumnya (Tamara, 1980; Mundzir, 2020).

Shah semakin kehilangan dukungan dari tiap-tiap kelompok massa. Baik itu kelompok petani, kelompok intelektual, kelas menengah dari berbagai lapisan serta sejumlah basis dalam militer. Setiap hari, demonstrasi tetap berlangsung dan mobilisasi massa telah melampaui jumlah normal. Setelah terjadinya perpecahan di tubuh militer, Shah hampir kehilangan kendali sepenuhnya atas Iran. Dalam keadaan panik, Shah mengupayakan sebuah strategi terakhir untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia telah mengangkat Syahpur Bakhtiar dari Front Nasional sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi, upaya tersebut gagal dan semakin memicu krisis nasional. Pada tanggal 16 Januari 1979, negara ini tengah dilanda pergerakan revolusioner. Shah yang telah kehilangan harapan, memilih untuk melarikan diri dengan menggunakan pesawat terbang. Sebelum meninggalkan Iran, Shah membentuk dewan negara yang didirikan pada tanggal 13 Januari 1979. Shah menunjuk orang kepercayaan dengan harapan suatu saat ia dapat kembali ke Iran dan kembali memimpin. Sehari setelah dewan negara dibentuk, keluarga Shah telah meninggalkan Iran dan pergi menuju Los Angeles, Amerika Serikat. Disana mereka telah disambut oleh para demonstran yang bersimpati pada perjuangan revolusi Iran (Mundzir, 2020).

19 Januari 1979 jutaan orang melakukan demonstrasi menuntut Syahpur Bakhtiar mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri dan meminta Khomeini untuk kembali ke Iran dan memimpin negara. Pada tanggal 1 Desember dini hari ratusan ribu rakyat Iran turun ke jalanan dengan menggunakan pakaian hitam dan putih sebagai tanda sedang berkabung. Pada malam ini rakyat Iran sedang memperingati hari muharram yang merupakan peristiwa Pembantaian Karbala. Gema takbir berkumandang dari berbagai tempat. Baik dari masjid, jalanan di Teheran dan di berbagai tempat lainnya seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengan Tuhannya (Mundzir, 2020; Tamara, 1980).

Selang beberapa waktu, demonstrasi di Iran mulai berkurang. Kendati demikian, aksi demonstrasi telah digantikan oleh aksi pemogokan. Puncak dari kelumpuhan ekonomi Iran terjadi ketika buruh minyak dari perusahaan minyak nasional Iran (NIOC) dan dari perusahaan logistik dalam rangka solidaritas mendukung perjuangan saudara sebangsanya. Situasi kian lama kian memburuk, produksi minyak Iran yang biasanya berjumlah 6 juta barrel, turun menjadi 600 ribu barrel. Akibatnya kelangkaan minyak dalam negeri telah menjelma menjadi krisis minyak nasional. Banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan pemanas. Pabrik-pabrik tutup akibat dari gerakan mogok nasional dan tidak ada pasokan energi untuk menggerakkan mesin. (Tamara, 1980).

### III. Berdirinya Republik Islam Iran

Paris, Desember 1978, Ayatollah Khomeini melalui pidatonya mendorong rakyat Iran untuk bersatu dan mengorbankan diri mereka sampai mereka berhasil membujuk militer untuk bergabung dalam perjuangan mereka. Jalanan di Teheran dipenuhi kerumunan orang, termasuk perempuan yang mengenakan kerudung hitam dan laki-laki yang mengacungkan tangan sembari membentangkan spanduk protes. Ribuan orang meneriakan slogan-slogan di tengah toko-toko yang tutup, terbakar, kendaraan terbalik, lampu polisi menyala, dan bau asap serta gas air mata. Suara tembakan terdengar di seluruh Teheran. Tentara gerilya bersenjata muncul di ibu kota, berkeliling dengan kendaraan patroli militer dan menutupi wajah mereka dengan masker. Para pejabat militer pro Shah Reza Pahlevi dieksekusi mati, begitu pula kroni-kroni Shah yang turut menyusul dalam proses eksekusi (Wagner, 2010).

Mengungsinya Shah ke luar negeri juga mendapat sambutan meriah dari para demonstran yang tumpah-ruah di jalanan Kota Teheran. Kepergian Shah dirayakan dengan peruntuhan patung dan monumen, klakson mobil dibunyikan, dan orang-orang mengibarkan poster Khomeini, media-media berita pun turut mengabarkan kepergian Shah dari Iran. Kepergian Shah menjadi penanda berakhirnya kekuasaan monarki di Iran. Di masa transisi menuju era baru Iran, terjadi suatu kegamangan dalam menjalankan roda pemerintahan mendatang. Perdana Menteri Bakhtiar menjanjikan Iran terbebas dari pengaruh kekuasaan oligarki, korupsi dan penertiban keamanan yang represif namun oleh Ayatollah Khomeini menolak kepemimpinan Bakhtiar dan menginstruksikan para pendukungnya untuk mencegah Bakhtiar berkuasa serta menuntut agar ia mundur dari posisi perdana menteri. Di bawah tekanan yang semakin besar, Bakhtiar

mengizinkan Khomeini kembali pada 1 Februari 1979, setelah 14 tahun di pengasingan. Lebih dari satu juta warga Iran menyambut kedatangannya pulang, dan kegembiraan mereka terlihat jelas. Namun keputusan Khomeini bulat, menolak kekuasaan Bakhtiar yang dinilai memiliki kecenderungan seperti pemerintahan lama. Ayatollah Khomeini menginstruksikan para pendukungnya untuk terus menggalang kekuatan melawan pemerintahan Bakhtiar serta mewaspadaikan potensi mata-mata CIA di kalangan warga Amerika di Iran. yang di duga ingin mengembalikan kekuatan pemerintahan kembali ke Shah (Wagner, 2010).

Selama sepuluh hari, Rezim Bakhtiar beristegang dengan pendukung Khomeini untuk mendapat eksistensi kekuasaan di Iran. Pada 5 Februari 1979, Khomeini menunjuk Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri untuk membentuk pemerintahan sementara, sebuah pilihan yang meyakinkan kelompok moderat yang khawatir akan pemerintahan mendatang. Khomeini menyatakan pemerintahan Bazargan mempunyai wewenang khusus dan harus dipatuhi, menyamakan perlawanan terhadap pemerintahan tersebut dengan penistaan. Banyak pejabat yang ditunjuk oleh Bakhtiar melarikan diri karena ketakutan menjadi target pendukung Khomeini. Pegawai negeri melakukan pemogokan dan perkantoran berhenti beroperasi. Gerilyawan bersenjata bentukan Khomeini merebut penjara, stasiun televisi dan radio, serta gedung-gedung pemerintah. Militer terbelah, ada yang secara revolusioner pro pada Khomeini dan pro pada Bakhtiar. Pada 11 Februari, 1979 kekuatan militer revolusioner menguasai sebagian besar kantor polisi dan gudang senjata di Teheran, mendistribusikan senjata dan menyerang pangkalan militer. Pihak militer yang dilumpuhkan oleh banyaknya tentara yang membelot mengakibatkan penertiban keamanan tidak efektif. Keadaan semakin berpihak pada Ayatollah Khomeini, Bakhtiar mengumukan pengunduran dirinya karena gagal menciptakan kekuasaan yang diharapkan serta gagal mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional. (Wagner, 2010).

Berdirilah Republik Islam Iran dibawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini dan Perdana Menteri Bazargan. Pemerintahan baru ini mengonsolidasikan kekuatan militer dan kepolisian serta membentuk komite revolusioner dan milisi revolusioner yang dijalankan secara independen. Aparat-aparat tersebut bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan, melindungi masyarakat juga melakukan penegakan moralitas publik agar terhindar dari budaya-budaya yang tak sejalan dengan ajaran agama yang ditegakkan. Pemerintah baru juga mulai mengaktifkan kembali kegiatan ekonomi-keuangan, perkantoran dan pertokoan serta aktivitas pengajaran dan pendidikan di tingkat sekolah dasar hingga universitas. Iran mengembalikan kembali nuansa kehidupan masyarakat yang memiliki hak kebebasan dalam politik, kesetaraan dan keadilan dalam ekonomi juga hasil swasembada sumber daya alam (Roy, 1994).

Pemerintahan baru Iran juga begitu peka terhadap perlindungan dan pemberdayaan kaum perempuan, anak-anak dan keadilan gender. Ayatollah Khomeini membagikan rasa bangganya terhadap perjuangan kaum perempuan dalam melawan Rezim Pahlevi, apalagi para perempuan yang gugur dalam peristiwa "Jumat Hitam". Khomeini menyematkan julukan 'singa pemberani' bagi perempuan-perempuan yang turut dalam aksi demonstrasi. Perempuan diberikan hak berpolitik dalam pemilihan umum pula pemberian kesempatan kerja yang adil dan setara dengan kaum pria. Kaum perempuan diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dan dapat mengakses pekerjaan yang layak seperti menjadi guru, pengacara, sekretaris, perawat dan dokter. Kendati demikian, kaum perempuan tidak setuju akan kebijakan penggunaan cadar, kebijakan dilarang melakukan peerceraian serta kebijakan sekolah khusus untuk kaum perempuan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang selama ini mereka perjuangkan (Tamara, 1980).

#### IV. Dampak Revolusi Terhadap Hubungan Luar Negeri Iran

Revolusi tak hanya berdampak pada perubahan tatanan sosial kemasyarakatan saja, tapi menyeluruh terhadap segala aspek kehidupan negara Iran termasuk aspek hubungan luar negeri. Semasa Shah Reza Pahlevi berkuasa, ia membangun tiga pilar untuk mempertahankan kekuasaannya melalui pilar militer, pilar birokrasi dan pilar patronase hukum. Kekuasaan militer diperkuat, jabatan menteri pertahanan dirubah menjadi menteri perang dengan tujuan tuk menegaskan bahwa sipil tidak berkenan ikut campur dalam urusan militer. Tidak hanya itu, Rezim pahlevi memiliki kecenderungan berpihak pada negara Blok Barat. Hal tersebut berdampak pada penambahan anggaran militer yang meningkat dua belas kali lipat dari 60 juta dollar AS pada 1954 menjadi 5,5 miliar dollar AS. Iran melakukan pendekatan dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan militer. Pada 1960, Iran adalah penerima bantuan terbesar AS di luar negara negara NATO. Sementara, pada 1959, Iran mendapatkan bantuan 159 juta dollar AS, suatu jumlah fantastis mengingat anggaran pertahanan Iran pada 1957 berjumlah 137 juta dollar AS (Fanami, 2012).

Kendati demikian, popularitas Rezim Pahlevi semakin menurun diakibatkan ketergantungan ekonomi Iran terhadap negara barat dan AS, juga atas pinjaman Iran kepada *International Monetary Fund* (IMF) yang memberikan syarat pengetatan pemakaian anggaran, memasukkan orang yang memiliki visi reformasi ekonomi di dalam kabinet, mempersilakan calon independen untuk bisa berpartisipasi dalam legislatif dan memulai *land reform*. Rasionalisasi ekonomi dan liberalisasi mengakibatkan terjadinya aksi mogok dan protes pegawai pemerintah (Clawson dan Rubin, 2005).

Pasca meletusnya Revolusi Iran yang mengakibatkan Rezim Pahlevi tumbang, kondisi hubungan luar negeri Iran bermanuver dari yang semula memihak terhadap Barat berubah menjadi menentang serta mengkampanyekan stabilitas di kawasan Timur Tengah serta menjunjung tinggi perdamaian. Namun, sejalan dengan terpilihnya presiden Iran dari era Imam Khomeini hingga Ahmadinejad, terdapat beberapa perubahan orientasi hubungan luar negeri Iran. Hal tersebut didasari atas Revolusi Iran yang berimplikasi terhadap tatanan geopolitik Timur tengah sangat besar, mengingat negara-negara di Timur Tengah masuk ke dalam kelompok *Third Country World* atau negara ketiga yang terbelakang. Negara-negara Timur Tengah terutama negara dalam kuasa rezim otoriter dan intervensi Barat memiliki

tanggapan positif terhadap Revolusi Iran, masyarakat di negara-negara tersebut berharap mempunyai impian untuk menggalakan revolusi di negaranya. Meskipun mayoritas Negara-negara Timur Tengah merespon dengan positif, Arab Saudi mempunyai respon yang berbeda. Arab Saudi merespon bahwa revolusi Iran sangat berbahaya dan dapat membuat masyarakatnya melakukan hal sama yang mengancam kekuasaan pemerintahan Arab Saudi dan otoritasnya. Negara-negara di Timur Tengah yang turut merespon positif Revolusi Iran dan Pemerintahan baru di Iran yang akan menegakan hubungan luar negeri dengan baik serta akan turut menentang penjajahan Israel atas Palestina tersebut menyadari akan adanya satu implikasi yang kurang diperhatikan dari respon-respon masyarakat akan Revolusi Iran. Negara-negara di Timur Tengah mulai menyadari bahwa respon masyarakatnya akan Revolusi Iran seakan-akan menjadi gendang dimulainya gerakan-gerakan Syiah di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Kuwait dan Bahrain dalam kurun waktu 1979-1980 (Fanami, 2012).

Revolusi Iran juga berdampak pada manuver hubungan luar negeri Iran dengan Amerika Serikat. Saat berlangsungnya Revolusi Iran, Amerika Serikat memberikan respon terhadap gerakan tersebut dengan memberikan bantuan peralatan militer agar rezim Reza Pahlevi tetap berkuasa, Amerika Serikat sangat menentang revolusi Iran dengan berbagai alasan. Jika Revolusi Iran berhasil maka Iran akan melakukan pembatasan atau menghapuskan pengaruh Amerika Serikat dalam kebijakan Iran. Amerika Serikat juga prihatin terhadap perubahan ekonomi terutama terkait minyak jika revolusi berhasil maka akan membuat harga minyak menaik dan hal tersebut dikhawatirkan oleh pejabat Amerika Serikat, alasan lainnya adalah Partai komunis Iran mendukung revolusi Iran dan dikhawatirkan sebagai ancaman penyebaran ajaran Komunisme di Iran. Selama kurun waktu 1978-1979, Departemen Luar negeri Amerika Serikat terus mengirimkan dukungan terhadap Rezim Pahlevi. Pada 4 Januari 1979, AS mengirim Jendral Robert E. Huyser, Panglima komando Amerika Serikat-Eropa ke Iran untuk membantu militer Iran dalam melawan revolusi. Huyser melakukan dukungan dengan memasok peralatan militer ke Iran dan Pakaian. Dalam misinya yang terakhir, Huyser menyadari bahwa pemerintahan rezim Reza Shah Pahlevi gagal dan Revolusi Iran akan berhasil. Menyadari hal tersebut, Huyser kembali ke Amerika Serikat dan menyarankan pemerintah untuk berkomunikasi secara intensif dengan Ayatollah Khomeini (Wise, 2011).

Kembalinya Khomeini ke Iran pada tahun 1979 menimbulkan reaksi besar terhadap masyarakat Amerika Serikat yang berada di Iran, hal tersebut didasari atas peristiwa pemukulan diplomat Amerika Serikat oleh para pendukung Khomeini. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Amerika Serikat menyarankan agar warga negara Amerika Serikat segera meninggalkan Iran atau mengungsi ke kawasan yang aman. Pada tahun 1980, Iran melakukan penyanderaan terhadap warga negara Amerika Serikat yang mengharuskan Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan perintah eksekutif untuk memblokir hak properti Pemerintah Iran, lembaga dan badan yang dikendalikannya serta bank sentral Iran berada dalam subjek yurisdiksi Amerika Serikat. Iran juga semakin memperburuk hubungannya dengan Amerika Serikat melalui embargo minyak yang menyebabkan perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat merugi dua hingga 10 kali lipat, hal tersebut juga yang mengharuskan Amerika Serikat mengurangi ketergantungan minyaknya pada Iran dan melakukan pengefisiensi energi (Wise, 2011).

Tak hanya Amerika Serikat yang bersitegang dengan Iran, Israel pun turut berada dalam tahap yang sama seperti yang dialami oleh Amerika Serikat. Semula hubungan Iran-Israel terbina dalam kerja sama ekonomi dan keamanan. Namun pasca revolusi, hubungan tersebut terputus dan Iran mengutuk segala tindakan Israel dalam melakukan penjajahan atas Palestina dan mendukung gerakan-gerakan militan anti-Israel baik di Libanon maupun Palestina. Secara signifikan, Pemerintah Iran yang baru mengubah dinamika hubungan antara Iran dan Israel, dari semula hubungan kerja sama terbatas menjadi konfrontasi dan permusuhan yang berkelanjutan. Konflik kedua negara tersebut terus berlanjut hingga kini dengan isu-isu seperti program nuklir Iran dan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok militan anti-Israel tetap menjadi pemicu ketegangan antara keduanya (Aharon, 2022).

## KESIMPULAN

Di bawah kekuasaan monarki, Iran menjadi salah satu negara di Timur Tengah dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan masyarakat yang paling signifikan. Iran tumbuh menjadi negara penghasil elektronik dan otomotif serta pertumbuhan industri yang cukup baik. Meskipun begitu, kondisi politik dan keamanan di Iran berada dalam perkembangan yang buruk. Eksekutif pemerintahan yang otoriter, korup dan terpatron serta didukung oleh aksi represif aparat keamanan menjadi bukti anomali antara kemajuan ekonomi yang ditorehkan oleh Iran dengan perkembangan situasi sosial-politik serta keamanan yang memprihatinkan dan menyengsarakan masyarakat Iran.

Gelombang Revolusi menjadi jawaban atas kesengsaraan masyarakat yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Elemen masyarakat Iran yang terdiri dari kaum intelektual, penyair, ulama, mahasiswa dan kaum perempuan tumpah-ruah di jalanan kota-kota di Iran. Mereka meyerukan agar Shah Reza Pahlevi mundur dari kekuasaannya serta menuntut pemerintahan yang bersih dari aksi represif, korupsi dan patronase, juga menuntut agar pemerintahan tidak bergantung pada pihak asing yang dapat mengakibatkan ketidakmandirian Iran dalam berbangsa dan bernegara. Pemerintah menjawab aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat tersebut dengan tindakan kekerasan dan berujung pada pembunuhan massa di beberapa aksi demonstrasi yang digelar di beberapa kota. Dalam menyukseskan revolusi, figur Ayatollah Khomeini pun ikut serta menyumbangkan perjuangannya demi membangun Iran yang sejahtera dan terbebas dari ketidakpatutan kekuasaan.

Kondisi Iran semakin tak berpihak pada pemerintah, Shah Reza Pahlevi mengungsi ke Amerika Serikat meninggalkan para loyalis-loyalisnya yang harus berhadapan dengan para demonstrasi. Republik Islam Iran berdiri

menggantikan Pemerintah Iran yang monarki. Pemerintahan dijalankan berdasarkan landasan syariat agama Islam. Republik Islam Iran mendapatkan apresiasi penuh dari beberapa negara di Timur Tengah karena telah berhasil memberikan menggalakan revolusi dan menumbangkan kekuasaan yang otoriter, hal tersebut menjadi dambaan masyarakat-masyarakat di Timur Tengah akan revolusi di negaranya. Dampak lain dari Revolusi Iran ialah pemutusan hubungan dengan Amerika Serikat dan juga Israel, hal tersebut ditunjukkan oleh Iran sebagai bukti bahwa negaranya pun dapat mandiri dan memiliki integritas tanpa intervensi dari pihak asing.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada rekan-rekan tim yang telah bersungguh-sungguh dalam merealisasikan artikel jurnal ini, meskipun didera banyak tantangan dan rintangan tapi semangat masih ada untuk menunaikan tugas yang mulia ini. Terima kasih kami tunjukkan pada bapak Ahmad Fuadin, M.Pd., dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang senantiasa membimbing kami dalam proses penyusunan artikel jurnal ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan di Pendidikan Sejarah, UPI angkatan 2023 yang senantiasa menstimulasi kami dengan semangat dan saran yang telah kami terima dengan senang hati. *Historia Vitae Magistra*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aharon, E. B. (2024). Political Audience and Non-linear Securitisation: Revisiting Israel–Iran Relations and the Making of the 1979 Islamic Revolution. *European Journal of International Security*, 9(1), 97-121.
- Ansari, A. M. (2010). The Myth of the White Revolution: Mohammad Reza Shah, 'Modernization' and the Consolidation of Power. *Middle Eastern Studies*, 37(3), 1-24.
- Clawson, P., & Rubin, M. (2005). *Eternal Iran: Continuity and Chaos*. New York: Palgrave Macmillan.
- Fanani, A. F. (2012). The Export of Islamic Revolution in Iran and its Threat for the US, the Soviet Union, and Arab Countries. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 8(1), 1-13.
- Fauziyah, S. (2016). Revolusi Islam Iran dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Syiah di Indonesia. *Tsaqofah: Jurnal Agama dan Budaya*. 14(1). 43-65.
- Garraghan, G. J. (1957). *Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press. Graham, R. (1979). *Iran: The Illusion of Power*. New York: St. Martin's Press.
- Mundzir, C. (2020). Dimensi Islam dan Politik: Telaah Historis atas Revolusi Iran 1979. *Al-Hikmah*, 22(2), 31-46.
- Muzzafar, M., Kausar, R. & Afzal, N. (2018). Muhammad Reza Shah Pahlavi Reign: An Analysis of White Revolution. *Pakistan Languages and Humanities Review*, 2(2), 1-12.
- Roy, O. (1994). *The Failure of Political Islam*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sayuti, H. (tanpa tahun). *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- Sihbudi, M. R. (1989). *Dinamika Revolusi Islam Iran Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafat Ayatullah Khomeini*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Sumarno, W. F. (2020). Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 145–158.
- Tamara, N. (1980). *Revolusi Iran*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wagner, H. L. (2010). *The Iranian Revolution*. New York: Infobase Publishing.
- Winarti, M., Darmawan, W., & Sjamsuddin, H. (2022). *Historiografi: Tinjauan Umum Historical Writing dan History of Historical Writing*. Bandung: Jendela Hasanah.
- Wise, K. (2011). Islamic Revolution of 1979: The Downfall of American-Iranian Relations. *Legacy*: 11(1), 1-15.